

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut dari jejak sejarahnya, Patani merupakan kesultanan yang cukup penting dalam pertumbuhan daerah perdagangan dan penyebaran Islam di alam Melayu. Patani menjadi begitu penting dalam sejarah Islamisasi dan pertumbuhan perdagangan karena merupakan satu-satunya kota pelabuhan dan pusat perdagangan Islam yang paling berpengaruh yang pernah muncul di perairan Laut China Selatan. Merujuk pada catatan pelawat-pelawat China, wilayah Patani telah dikenali sejak abad kedua Masehi, melalui hubungan dagang antara pedagang China dengan negeri-negeri di Asia Tenggara. Mereka mengenali sebuah negeri bernama "*Lang-ya-hsiu*" atau Langkasuka yang terletak di pantai timur semenanjung tanah Melayu antara Senggora (Songkhla) dan Kelantan dengan ibukota terletak di sekitar daerah Yarang. Dalam catatannya disebutkan bahwa wilayah ini merupakan daerah perdagangan dengan adanya pelabuhan bagi para pelaut. Angkatan laut China saat akan menyebrangi wilayah teluk Siam dalam perjalanannya ke Vietnam, ke Semenanjung Melayu, telah menemukan daratan ini. Menurut ahli sejarah Thailand, A.Teeuw dan Wyatt mengemukakan bahwa kerajaan Patani telah berdiri sekitar pertengahan abad ke-14 dan ke-15. Saat itu Patani mulai dikenal melalui perdagangan dan penyebaran Islam. Cerita rakyat *Hikayat Patani* menceritakan mengenai asal mula Kerajaan Patani yang diawali dari

sebuah kerajaan Melayu berpusat di Kota Mahligai yang diperintah oleh Phya Tu Kerab Mahayana (Hindu).

Kemunduran Patani dan awal integrasi wilayah pada zaman akhir pemerintahan Raja Kuning (1635-88), Patani mulai menuju tanda-tanda zaman kemerosotan. Keadaan ini disebabkan karena Raja Kuning meninggalkan kerajaan tanpa seorang pengganti yang berwibawa. Dalam *Hikayat Patani* disebutkan setelah kematian raja terjadi pemberontakan diantara pembesar-pembesar negeri yang bergelar Datuk yang berebut kuasa untuk menjadi Bendahara (Perdana Menteri) dan menjadikan Raja Patani sebagai boneka saja. Pada awal abad ke-17 pemerintahan dari dinasti Kelantan mulai menguasai kerajaan Patani. Perselisihan kekuasaan kemudian mewarnai dinamika kerajaan Patani. Perselisihan menimbulkan perang saudara yang berakibat negeri Patani mengalami kekacauan pemerintahan serta keresahan di kalangan penduduk. Perang saudara yang terjadi menyebabkan situasi perdagangan goyah terutama bagi para saudagar asing yang berangsur-angsur memindahkan pola peniagaan mereka ke negeri lain yang jauh lebih aman seperti Malaka dan Singapura. Kenyataan ini akhirnya berdampak pada ekonomi Patani yang mengalami kemerosotan.

Dalam masa Patani sedang menghadapi kekacauan politik, pihak kerajaan Siam (Ayudhya) sedang berperang dengan Burma dalam usaha mempertahankan wilayah kekuasaan mereka. Peperangan Burma-Siam secara tidak langsung melibatkan negeri-negeri Melayu Utara, termasuk Patani yang menjadi daerah "rebutan" di antara kedua kuasa kerajaan tersebut. Upaya

penguasaan wilayah ini ditengarai memiliki beberapa motif, Pertama, sebagai "prestis politik" dimana semakin luas cakupan wilayah kerajaan semakin besar pengaruh dan penghargaan dari bangsa lain, kedua, motif sosiol ekonomi yang berhubungan dengan kepentingan mendapatkan tenaga kerja manusia murah sambil memperoleh sumber-sumber pendapatan yang dapat dimiliki dari pelabuhan Patani yang cukup ramai saat itu. Ketiga, motif strategi ekonomi untuk menguasai wilayah strategis Segenting Kra yang menghubungkan Teluk Benggala dengan Teluk Siam. Peristiwa peperangan antara Burma Siam mau tidak mau melibatkan wilayah serta gangguan terhadap kedaulatan Patani. Siam pada akhirnya dapat menguasai wilayah Patani, dengan peperangan besar tentunya. Pada tahun 1776, Phya Taksin Raja Thonburi berhasil mengambil alih kerajaan Patani melalui jalan peperangan. Walaupun kerajaan Melayu Patani berusaha untuk mempertahankan diri tetapi Siam berhasil menguasai Patani pada tahun 1778. Akibat kekalahan itu, sebanyak 4.000 orang Melayu Patani menjadi tawanan dan dibawa ke Bangkok sebagai hamba tebusan. Setelah kejatuhan Patani itu, Siam melantik raja baru yang sesuai dengan selera mereka. Genre gerakan anti-Siam mulai tumbuh dan berkembang pada masa ini. Berbagai pemberontakan muncul justru dari pemimpin yang ditunjuk oleh kuasa kerajaan Siam. Salah satunya adalah pemberontakan Tengku Lamidin Raja Patani yang berusaha untuk memberontak dengan bantuan Raja Annam yang beragama Islam, Okphaya Cho So, dan menyerang kedudukan tentara Siam. Dibantu oleh Sheikh Abdul Kamal, seorang ulama berasal dari Mekah, tetapi akhirnya gagal.

Munculnya berbagai pemberontakan di wilayah Selatan, memaksa pemerintah kerajaan Siam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah Selatan. Kebijakan anti pemberontakan yang dikeluarkan oleh Raja Chulalongkorn adalah dengan memecah Kerajaan Melayu Patani menjadi 7 wilayah atau *hua muang* yang ditujukan sebagai siasat melemahkan kekuatan orang Melayu Patani. Di setiap wilayah yang terbagi, kemudian dilantik seorang raja atau *chao muang* di bawah pengawasan kerajaan Siam di Songkhla. Dengan perubahan ini, maka kesatuan wilayah Kerajaan Melayu Patani menjadi terpecah. Tujuh buah negeri tersebut dan raja-raja pemerintahnya adalah seperti berikut:

1. Tuan Haji Sulung
2. Nik Dir
3. Tuan Nik
4. Tuan Yalor
5. Nai Pai
6. Nik Dah
7. Tuan Mansur

Nama-nama tersebut adalah yang dipecah menjadi 7 negeri atau kerjaan supaya memudahkan untuk mengontrol pemerintahan di wilayah tersebut, padahal hal itu Cuma untuk memudahkan pemerintah Thailand untuk memisahkan persatuan rakyat Patani. Kelemahan pemisahan wilayah ditandai dengan beberapa faktor-faktor sebagai berikut:

1. Sentralisasi pembangunan dan ketimpangan sumber daya alam antara kaum mayoritas (pemerintah Thailand) dan mayoritas (masyarakat Patani). Contohnya pembangunan infrastruktur yang tidak merata di Thailand Selatan dan sumber daya alam yang diambil untuk untuk pemerintah pusat saja itu keadaan yang dirasakan rakyat di Thailand Selatan atau Patani pada khususnya.
2. Implementasi praktek paksaan asimilasi masyarakat mayoritas Thailand baik dalam bidang sosial, politik, budaya, pendidikan dan ekonomi terhadap kaum Muslim Patani.
  - a. Adanya intervensi pemerintah Thailand dalam bidang agama yaitu segala sesuatu yang berbasiskan Islam harus dihapuskan sehingga kaum Muslim Patani lebih susah untuk menuntut ilmu keagamaan.
  - b. Dilarang menggunakan bahasa Melayu di sekolah dan pergaulan social.
  - c. Kurikulum di madrasah-madrasah harus sesuaikan dengan kurikulum bangsa Thailand, kurikulum keagamaan hanya ada di pesantren saja.
  - d. Campur tangan pemerintah Thailand terhadap Muslim Patani dalam bidang politik dan ekonomi, hal ini jelas terlihat karena hasil ekonomi diambil langsung oleh pemerintah pusat Thailand dan tidak dirasakan oleh rakyat Patani.
3. Kegagalan pemerintah Thailand dalam mengakomodasi perbedaan identitas di antaranya perbedaan agama etnik dan budaya.

Wilayah Patani (Selatan Thailand) merupakan salah satu wilayah atau provinsi yang letaknya di bagian Thailand Selatan, yang mayoritas penduduknya 95% beragama Islam berbangsa Melayu Patani (Selatan Thailand) semenjak tahun 1150 M, yang terkenal dengan Negara Patani Darussalam, di atas kekuasaan kerajaan Langkasuka. Dan di masa itu banyak ulama-ulama dan para cendekiawan Islam yang dapat mengembangkan agama Islam.

Pada tahun 1785 hingga tahun 2019, genap 234 tahun Patani (Selatan Thailand) dijajah oleh Siam (Thailand) dengan perencanaan politiknya terhadap rakyat Patani (Selatan Thailand) melalui sistem polisi konstitusi dan asimilasi, dengan maksud mengsiamkan Melayu dan mem-Buddha-kan Islam, mereka menghapuskan ulama-ulama dan para cendekiawan Islam dengan berbagai cara, hingga sekarang di Patani (Selatan Thailand) sangat kekurangan dari segi pendidik dan para cendekiawan Islam untuk mengembangkan Islam di sana. Dengan itu, sistem pemerintahan kesultanan Melayu telah dihapuskan, dengan termeterainya perjanjian Anglo Bangkok-Siam pada tahun 1902, adapun isi perjanjian itu sebagai berikut:

*“Menghapus kekuasaan raja-raja Melayu serta menepatkan wilayah Patani bukan lagi sebagai sebuah kerajaan Melayu yang merdeka dan berdaulat (Kingdom of Patani Malay)”*

Patani telah diakui oleh British sebagai sebagian dari pada jajahan Siam (Thailand) walaupun tanpa kerelaan orang-orang Melayu Patani (Selatan Thailand) Pada tahun 1909-2019, genap 234 tahun bangsa Melayu Patani berada di bawah kekuasaan kerajaan Thailand, dan selalu memperjuangkan

atau merebut kekuasaan dari kerajaan Thailand untuk mendapat kembali kemerdekaan Patani (Selatan Thailand) yang terletak di perbatasan Selatan Thailand dengan Malaysia. Wilayah yang terdiri dari empat provinsi Ini merupakan komunitas yang beragama Islam mendominasi populasi di wilayah tersebut. secara kesukuan Keempat provinsi ini memiliki ikatan sejarah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari beberapa sumber buku atau media masa maupun fakta di lapangan yang sebenarnya terjadi tentang Kebijakan Integritas Pemerintah Thailand terhadap kaum minoritas Melayu Patani jauh dari kata setara atau lebih baik, hal ini dirasakan oleh penulis sendiri dimana secara tidak langsung yang dirasakan salah satunya tentang kesenjangan sosial jauh dari kata merata yang dirasakan oleh Muslim Melayu Patani, kurikulum pembelajaran islam sangat dibatasi terlebih lagi di bidang ekonomi yang hanya hasilnya saja diambil oleh pemerintah pusat thailand. Maka dari itu penelitian penulis ini mengambil judul tentang kebijakan integrasi pemerintah Thailand terhadap kaum minoritas Melayu Patani.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Kebijakan integrasi apa yang diterapkan pemerintah Thailand terhadap minoritas Melayu Patani ?
2. Bagaimana kaum minoritas Melayu Patani bereaksi terhadap kebijakan integrasi Pemerintah Thailand?
3. Apa yang menghambat penerapan kebijakan integrasi pemerintah Thailand terhadap kaum minoritas Melayu Patani ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memaparkan kebijakan integrasi yang diterapkan pemerintah Thailand terhadap minoritas Melayu Patani
2. Untuk mengetahui reaksi kaum minoritas Melayu Patani terhadap kebijakan integrasi Pemerintah Thailand
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penerapan kebijakan integrasi pemerintah Thailand terhadap kaum minoritas Melayu Patani.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi manfaat bagi:

1. Secara Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan khazanah keilmuan khususnya untuk Program Studi Sosiologi Fakultas Ushuluddin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Secara akademisi, penelitian ini diharapkan bisa berguna terutama bagi yang memfokuskan pada kajian tentang kebijakan integrasi pemerintah Thailand terhadap kaum minoritas Melayu Patani.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan menjadi bahan referensi dalam penelitian berikutnya yang berhubungan dengan kebijakan integrasi pemerintah Thailand terhadap kaum minoritas Melayu Patani. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman tentang kebijakan integrasi pemerintah Thailand terhadap kaum minoritas Melayu Patani. Selain itu,



penelitian ini bisa menjadi sumbangan kontribusi praktis kepada Pemerintah Thailand agar dapat melaksanakan kebijakan integrasi yang seadil-adilnya tanpa diskriminasi sehingga tidak terjadi konflik berkepanjangan.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Kebijakan integrasi pemerintah Thailand akan berjalan dengan lancar jika pelaksana kebijakan dan kaum minoritas Patani memahami secara komprehensif tujuan dari kebijakan tersebut. Kebijakan integrasi tersebut merupakan salah satu dari kebijakan publik pemerintah Thailand. Sebagai warga negara yang tergabung dalam masyarakat minoritas di Patani, penulis mempunyai keinginan besar untuk memahami permasalahan yang timbul sehingga dapat membantu mengurai permasalahan yang timbul sehingga dapat dipahami oleh masyarakat Patani khususnya dan pemerintah Thailand secara umum.

Orang-orang analisis kebijakan adalah mereka yang terus mengembangkan bidang tersebut dengan cara yang kadang-kadang sangat abstrak dan model-model matematis. Para teoritis kebijakan publik politik lebih tertarik dengan hasil-hasil akhir kebijakan publik. Dengan interaksi-interaksi politik yang menentukan suatu peristiwa tertentu dan di dalam kebijakan kesehatan. Pendidikan. Kesejahteraan lingkungan. Analisis kebijakan menginginkan agar rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh kliennya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Sehingga analisis kebijakanpun harus konsisten bahwa analisis kebijakan

adalah mahluk yang berkomitmen untuk mengembangkan keuntungan publik dan mencapai kesejahteraan bersama.

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan. Seoleh-oleh tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya. Tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Hom dalam Wahab (2006:65) bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan

Dwiyanto Indiahono (Edward III. 1980:48) mengemukakan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu:

1. Faktor komunikasi (*communication*).
2. Sumber daya (*resources*).

3. Disposisi (*disposition*).
4. Struktur (*bureaucratic structure*).

